

JAKARTA MENUJU KOTA YANG BERKELANJUTAN

Analisis Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Dokumen RPJMD DKI Jakarta Tahun 2013 - 2017

Oleh : Saeful Muluk

Pengantar

Gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mengemuka menjadi isu global sejak 1987 sejak *The World Commission on Environment and Development* (WCED) menyampaikan dalam laporannya yang dikenal dengan *Brundtland Report*. Gagasan ini semakin berkembang sejak *Earth Summit* tahun 1992 di Rio de Janeiro.

Indonesia mulai mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan pada tahun 1997 melalui penyusunan dokumen *National Sustainable Development Strategy* (Agenda 21) yang berisi rekomendasi kepada sektor untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2020.

Konsep pembangunan berkelanjutan terus mengalami perkembangan sejak kemunculannya pertama kali yang sangat cenderung ke isu lingkungan. Seiring dengan perkembangan tersebut cakupan dan indikator pembangunan berkelanjutan terus berubah. Pada KKT Bumi 2005, konsep pembangunan berkelanjutan mulai mengakui keterkaitan yang saling mempengaruhi antara keberlanjutan pembangunan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus.

Meskipun pembangunan berkelanjutan terus diwacanakan dan berusaha diterapkan, sebenarnya pemerintah Indonesia belum memiliki batasan atau pengertian yang jelas mengenai pembangunan berkelanjutan versi pemerintah Indonesia sendiri. Hal ini bisa diperiksa misalnya dalam dokumen-dokumen resmi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam dokumen RPJMN 2010-2014 misalnya konsep pembangunan berkelanjutan disebutkan sebagai salah satu dari 3 prinsip pengarusutamaan yaitu pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender. Tidak ada sebuah pernyataan yang jelas mengenai apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan selain menambahkan kata “berkelanjutan” dalam semua hal.

Wacana mengenai mainstreaming atau pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan seharusnya diawali dari batasan atau pengertian ini sehingga tidak begitu saja menelan atau mengadopsi mentah-mentah pengertian, prinsip-prinsip dan indikator-indikator yang ditentukan oleh negara lain dan atau lembaga internasional dan multinasional yang menguasai berbagai forum dan kepentingan internasional.

Paper ini mencoba memaparkan sebuah analisa mengenai pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan

pembangunan yang dikaji adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta periode 2013 – 2017 di bawah kepemimpinan duet Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Jokowi-Ahok.

Tujuan dari analisa ini adalah mengetahui sejauhmana konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya konsep mengenai pembangunan kota berkelanjutan diadopsi dalam dokumen RPMJD DKI Jakarta. Konsep mengenai pembangunan kota berkelanjutan yang dikembangkan oleh beberapa ahli menarik untuk dikaji lebih jauh penerapannya dalam kota seperti DKI Jakarta yang saat ini menghadapi tantangan yang besar mengenai keberlanjutannya.

Dokumen RPJMD dipilih menjadi objek analisis karena dokumen ini merupakan acuan utama dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan di daerah. Asumsinya, jika konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah diadopsi dalam perencanaannya diharapkan hal itu terjadi dalam pelaksanaan dan hasil-hasilnya.

Pembangunan Kota Berkelanjutan

Wacana mengenai pembangunan berkelanjutan telah merambah berbagai isu atau sektor kehidupan. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan kota berkelanjutan. Menurut Kustiwan (2013), pada dasarnya kota tidak pernah berkelanjutan karena kota selalu mengeksploitasi surplus pangan dan material yang dihasilkan dari wilayah belakangnya dan dengan demikian mengganggu sistem ekologis yang sebelumnya bersifat lebih siklis. Namun, secara potensial kota bisa lebih berkelanjutan dari kondisi saat ini.

Menurut Girardet (2004), kota berkelanjutan adalah kota yang memungkinkan semua warganya memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya, tanpa menurunkan kondisi lingkungan alam atau kehidupan orang lain, di masa kini dan di masa depan. Batasan ini memang terlalu menyederhanakan seolah kota bisa hidup secara mandiri tanpa keterkaitan dengan wilayah lain di sekitarnya. Keberlanjutan suatu kota dengan demikian harus memperhatikan keberlanjutan wilayah-wilayah sekitar yang menjadi penopangnya. Misalnya, keberlanjutan DKI Jakarta sangat tergantung juga kepada keberlanjutan daerah-daerah sekitar yang menjadi sumber aliran sumberdaya kehidupan baik air, pangan, maupun pengelolaan limbah.

Tujuan pembangunan kota berkelanjutan adalah mencakup upaya pengurangan penggunaan ruang dan sumber daya alam, rasionalisasi dan pengelolaan secara efisien aliran materi di perkotaan, perlindungan dan peningkatan kesehatan penduduk perkotaan, pemeliharaan kemudahan yang merata dalam sumberdaya dan pelayanan, dan peningkatan keragaman kultural dan sosial (EEA, 1995).

Sedangkan sasaran pembangunan kota menurut UN Habitat (1996) adalah mewujudkan bentuk kota yang kompak (*compact city*), preservasi ruang terbuka hijau dan ekosistem-ekosistem yang sensitif, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi limbah

dan polusi, penggunaan kembali dan daur-ulang material, penciptaan lingkungan yang berorientasi pada komunitas, pengalokasian perumahan yang layak dan terjangkau, peningkatan pemerataan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal yang bersifat restoratif.

Dalam upaya membangun kota yang berkelanjutan, Wheeler (2004) mengajukan beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam merumuskan perencanaan wilayah/kota yang berkelanjutan. Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pertumbuhan dan perencanaan tata ruang
2. Transportasi
3. Perlindungan dan restorasi lingkungan, ruang terbuka hijau
4. Kesetaraan dan keadilan
5. Pengembangan ekonomi
6. Zonasi dan perijinan pemanfaatan ruang
7. Perencanaan kota, perencanaan lanskap
8. Bentuk perkotaan (kepadatan, compact, mixed-use development)
9. Kesehatan masyarakat
10. Perumahan
11. Penggunaan energi dan sumberdaya

Lebih jauh Iwan Kustiwan (2013) mengembangkan beberapa prinsip pembangunan kota berkelanjutan sebagai berikut:

1. Menciptakan dan preservasi terhadap bentuk-bentuk yang kompak dan berkepadatan lebih tinggi.
2. Mempertahankan lahan pertanian di sekitar kawasan perkotaan
3. Menyediakan penggunaan lahan campuran.
4. Mempertahankan kawasan terbangun yang telah ada
5. Menyediakan ruang terbuka hijau
6. Mendorong ukuran kapling perumahan yang berukuran sedang/menengah
7. Membatasi bangunan-bangunan untuk berukuran sedang.
8. Menyediakan bangunan yang beragam jenis, ukuran dan umur

Konsep pembangunan kota berkelanjutan yang dipaparkan di atas mulai dari pengertian hingga prinsip-prinsipnya, selanjutnya dijadikan kerangka untuk mengkaji dokumen RPJMD DKI Jakarta. Untuk lebih memudahkan analisa, selanjutnya kerangka tersebut diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Adakah pernyataan yang merefleksikan konsep pembangunan berkelanjutan di dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta?
2. Apakah isu-isu pembangunan kota berkelanjutan memiliki keselarasan dengan isu-isu strategis pembangunan dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta?
3. Sejauhmana tujuan pembangunan kota berkelanjutan direfleksikan dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta?
4. Sejauhmana sasaran pembangunan kota berkelanjutan selaran dengan sasaran pembangunan Kota DKI Jakarta yang termuat dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta?

5. Sejauhmana prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan direfleksikan dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta?

Visi Pembangunan Jakarta Baru

RPJMD DKI Jakarta menyatakan visi pembangunan DKI Jakarta periode 2013-2015 sebagai berikut:

“Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”.

Lebih jauh pernyataan visi tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud Jakarta Baru adalah ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global, kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera dan kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Pernyataan visi dan penjelasannya tersebut di atas merefleksikan secara eksplisit tentang pembangunan kota berkelanjutan. Kota berkelanjutan dimaknai sebagai kota yang layak dan manusiawi, kota yang aman dan nyaman, kota yang masyarakatnya produktif, sejahtera dan berbudaya dan kota dengan institusi yang bersih dan melayani.

Merujuk kepada pilar-pilar pembangunan berkelanjutan yang terdiri perpaduan utuh keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan, tampak bahwa semua pilar tersebut telah menyatu dalam konsepsi Jakarta Baru. Dengan kata lain, konsepsi Jakarta Baru yang menjadi visi pemerintahan DKI Jakarta periode 2013-2017 sudah sejalan dengan konsepsi pembangunan kota berkelanjutan.

Isu Pembangunan DKI Jakarta

Selanjutnya, dokumen RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 menginventarisir sebanyak 21 isu pembangunan yang menjadi perhatian pemerintahan Jokowi – Ahok pada 5 tahun kepemimpinannya. Secara garis besar, seluruh isu tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok isu yaitu isu ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan (Tabel 1).

Merujuk kepada kerangka Wheeler mengenai isu-isu perencanaan pembangunan kota berkelanjutan, secara keseluruhan isu-isu pembangunan Jakarta yang diinventarisir dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta telah sejalan dengan kerangka tersebut. Misalnya terkait isu ekonomi, Wheeler menyebutkan soal pengembangan ekonomi, kesetaraan dan keadilan. Isu-isu tersebut sejalan dengan isu strategis pembangunan ekonomi DKI Jakarta seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. Demikian juga untuk isu-isu sosial dan lingkungan. Di dalam kerangka Wheeler isu kelembagaan tidak disebutkan secara eksplisit.

Tabel 1. Isu-Isu Pembangunan Kota DKI Jakarta

Isu Ekonomi	Isu Sosial	Isu Lingkungan	Isu Kelembagaan
1. Penguatan ketahanan pangan 2. Pengelolaan pembiayaan pembangunan 3. Peningkatan daya saing global 4. Peningkatan perbaikan iklim investasi 5. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja 6. Pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah	1. Pengelolaan kependudukan yang berkualitas 2. Peningkatan kualitas pendidikan 3. Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan 4. Pembangunan budaya multi-kultur 5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban	1. Pengembangan sistem transportasi massal 2. Antisipasi banjir, rob, dan genangan 3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Penanggulangan dampak perubahan iklim 5. Pengendalian pemanfaatan ruang kota 6. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota	1. Reformasi birokrasi 2. Pengembangan kerjasama antarkota dan kerjasama internasional 3. Jakarta sebagai ibu kota NKRI 4. Pembangunan telematika Jakarta

Tujuan Pembangunan Jakarta Baru

Tujuan pembangunan selain tercermin dalam visi juga bisa dilihat secara lebih konkrit dalam penjabaran visi ke dalam pernyataan-pernyataan misi pembangunan. Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan 5 misi pembangunan yang direncanakan dicapai selama 5 tahun ke depan (Tabel 2). Dari 5 misi tersebut, terdapat 2 misi yang secara eksplisit terkait dengan aspek lingkungan, 2 misi terkait aspek sosial, dan 1 misi terkait aspek kelembagaan. Aspek ekonomi justru tidak tampak secara eksplisit dalam pernyataan kelima misi tersebut.

Membaca dari misinya, sepertinya aspek ekonomi lebih minor dibanding aspek sosial dan lingkungan. Atau dengan kata lain, tujuan pembangunan Jakarta lebih pro sosial dan lingkungan ketimbang pembangunan ekonomi. Apakah ini berarti pemerintah DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya pembangunan ekonomi kepada sistem pasar?

Tabel 2. Misi Pembangunan DKI Jakarta

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain; 3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota; 4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota; 5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

Jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan kota berkelanjutan seperti yang diajukan EEA sepertinya agak sedikit berbeda terutama menyangkut efisien penggunaan sumberdaya alam.

Ini yang tidak nampak secara eksplisit dalam misi pembangunan DKI Jakarta. Hal ini mungkin karena DKI Jakarta menganggap kegiatan ekonominya tidak berbasis pada penggunaan sumberdaya alam. Namun untuk aspek-aspek yang lain banyak kesesuaiannya.

Sasaran Pembangunan DKI Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta dalam kepemimpinan Jokowi-Ahok telah menetapkan 8 sasaran pembangunan yang akan mereka capai selama kepemimpinannya lima tahun ke depan. Sejalan dengan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan, kedelapan sasaran dan masing-masing indikatornya dikelompokkan ke dalam sasaran pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Tabel 3).

Tabel 3. Sasaran Pembangunan DKI Jakarta

Sasaran Pembangunan Ekonomi	Sasaran Pembangunan Sosial	Sasaran Pembangunan Lingkungan
1. Kota yang mampu mengembangkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa (PDRB sektor jasa dari 72,48 persen menjadi 73,23 persen) 2. Kota yang pendapatan per kapita nya tumbuh pesat dan merata (Pendapatan per kapita meningkat dari Rp.101 juta menjadi Rp.160 juta, Gini ratio berkurang dari 0,385 menjadi 0,360, dan persentase penduduk miskin berkurang dari 3,69 persen menjadi 3,00-3,25 persen) 3. Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang terkendali (pertumbuhan ekonomi dari 6,50 persen menjadi 7,5 – 7,8 persen dan tingkat inflasi dari 5,36 persen menjadi tidak lebih dari 5 persen)	4. Kota dengan Human Development Index (HDI) yang bertambah baik dari 77,97 menjadi 79,60 (AHH dari 74,70 tahun menjadi 76,00 tahun, AMH dari 99,13 persen menjadi 99,99 persen, RLS dari 10,93 tahun menjadi 12,00 tahun). 5. Kota yang memperhatikan penanganan permasalahan sosial (jumlah titik lokasi rawan PMKS anak jalanan dari 48 titik menjadi 20 titik dan jumlah Pusat Santunan Keluarga (Pusaka) untuk lansia yang dapat dijangkau oleh Pemerintah Daerah dari 136 pusaka menjadi 150 pusaka) 6. Kota yang tingkat toleransi warganya semakin baik (Berkurangnya jumlah konflik sosial dari 24 kasus menjadi 15 kasus, meningkatnya indeks demokrasi dari 77,44 menjadi 85 dan berkurangnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum dari 24 lokasi menjadi 15 lokasi)	7. Kota yang pembangunannya yang berimbang antara kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan ruang ekonomi yang dapat dilihat dari peningkatan persentase luasan RTH dari 9,90 persen menjadi diatas 11 persen. 8. Kota yang semakin layak sebagai tempat tinggal (Rasio ketersediaan dan kebutuhan rusun dari 13 persen menjadi 50 persen)

Sasaran-sasaran pembangunan yang dirumuskan UN Habitat yang lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan dan sosial tampaknya menemukan keselarasan yang hampir sempurna dengan misi pembangunan DKI Jakarta. Namun dari aspek ekonomi, ada perbedaan yang

cukup mendasar dalam sasaran dan indikator pembangunan ekonomi. UN Habitat menekankan pengembangan ekonomi lokal yang restoratif sementara pembangunan ekonomi DKI Jakarta masih menggunakan pendekatan konvensional seperti pertumbuhan dan inflasi.

Secara keseluruhan, sasaran-sasaran pembangunan yang dirancang pemerintah DKI Jakarta telah mencakup seluruh aspek pembangunan berkelanjutan. Tetapi jika konsisten dengan rumusan isu pembangunan, harusnya ada sasaran yang eksplisit untuk pembangunan kelembagaan.

Strategi Pembangunan Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan 23 strategi pembangunan yang akan dijalankan selama tahun ke depan. Secara keseluruhan, strategi tersebut telah menyentuh semua pilar pembangunan berkelanjutan baik pilar pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan. Jika dilihat lebih jauh, ternyata strategi pembangunan sosial dan lingkungan porsi nya jauh lebih besar dibandingkan strategi pembangunan ekonomi dan kelembagaan. Hal ini bisa dimaknai sebagai keberpihakan yang cukup besar terhadap pembangunan sosial dan lingkungan. Untuk melihat keberpihakan yang lebih konkrit harus lebih jauh baik dalam pengalokasian anggaran maupun implementasi program di lapangan.

Tabel 4. Strategi Pembangunan DKI Jakarta

Strategi Pembangunan Ekonomi	Strategi Pembangunan Sosial	Strategi Pembangunan Lingkungan
1. Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kota	5. Peningkatan ketahanan pangan kota	14. Optimalisasi penataan ruang
2. Penguatan dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan	6. Penyediaan rumah layak huni bagi semua warga masyarakat dan peningkatan kualitas permukiman kota	15. Pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi Kota Berbasis Angkutan Umum Massal
3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan dan energi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota	7. Peningkatan ketertiban umum dan kerukunan antar umat beragama	16. Pengembangan dan pengelolaan sistem tata air yang terpadu
4. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan	8. Pengembangan budaya dalam pembangunan perkotaan	17. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas
	9. Peningkatan pelayanan pendidikan	18. Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara
	10. Peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat	19. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketahanan kota dalam mengurangi dampak perubahan iklim
	11. Peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	20. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau
	12. Pembinaan kehidupan politik dan demokrasi	
	13. Peningkatan partisipasi	

Strategi Pembangunan Ekonomi	Strategi Pembangunan Sosial	Strategi Pembangunan Lingkungan
	masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	
Strategi Pembangunan Kelembagaan		
21. Penataan kelembagaan, organisasi, dan kapasitas aparatur pemerintahan 22. Pengembangan kerjasama antar daerah 23. Peningkatan pelayanan publik		

Dari paparan tentang isu strategis, visi, misi/tujuan, sasaran dan strategi pembangunan tersebut di atas ada beberapa catatan kritis sebagai berikut:

1. *Ada inkonsistensi kerangka pikir terkait dengan tujuan/misi dan sasaran pembangunan.* Dalam pernyataan misi isu tentang pembangunan ekonomi tidak terlihat dengan jelas. Demikian juga dalam pernyataan sasaran pembangunan, isu tentang pembangunan kelembagaan tidak dirumuskan dengan jelas.
2. *Mainstreaming pembangunan berkelanjutan.* Dokumen RPJMD DKI Jakarta memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pendekatan pembangunan yang digunakan adalah paradigma pembangunan berkelanjutan. Namun dalam berbagai segi seperti yang sudah dijelaskan di atas, tampak sekali bahwa perencanaan jangka menengah DKI Jakarta sudah mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan. Hanya saja pada aspek ekonomi, prinsip pengurangan sumberdaya alam dalam kegiatan ekonomi memang tidak terlihat secara eksplisit dalam berbagai indikator yang ada. Dugaannya karena kegiatan ekonomi DKI Jakarta lebih dititikberatkan sektor perdagangan dan jasa. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat ekstraktif mungkin sangat sedikit bahwa mungkin tidak ada di Jakarta. Namun, meskipun tidak ada kegiatan ekonomi ekstraktif, DKI Jakarta dapat mengurangi permintaan terhadap barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi ekstraktif tersebut termasuk pengurangan bahan energi dengan mengembangkan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan.

DKI Jakarta, Kota Yang Berkelanjutan?

Berdasarkan perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, DKI Jakarta sudah mengarah pada bentuk kota yang berkelanjutan. Namun demikian, semua itu tergantung pada implementasi perencanaan tersebut di lapangan.

Melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi-Ahok satu tahun terakhir, ada optimisme ke arah itu. Beberapa kebijakan pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan sudah dijalankan seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, pengembangan RTH, kebijakan transportasi massal, penataan pedangan kaki lima, dsb. Namun tentu hasilnya baru bisa dilihat 2 – 3 tahun ke depan. Jika pasangan ini tetap konsisten dan fokus dalam menjalankan rencana pembangunannya, bukan tidak mungkin kota DKI Jakarta yang berkelanjutan akan terwujud.

Namun demikian, kerangka pikir kota DKI Jakarta yang berkelanjutan harus diletakkan dalam konteks pembangunan kota DKI Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya bukan sebagai kota yang terisolasi dari wilayah-wilayah sekitarnya. Karena itu salah strategi pembangunan yang dikembangkan yaitu pengembangan kerjasama antar daerah merupakan strategi yang tepat untuk mendukung keberlanjutan kota DKI Jakarta.

Bahan bacaan

1. Materi-Materi Perkuliahan Topik Khusus Pembangunan Berkelanjutan.
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014*.
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2017*.